

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masalah yang timbul dalam pembangunan salah satunya yaitu masalah kemiskinan dan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari upaya dalam mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang menjadi fokus serta perhatian pemerintah. Menurut BPS, kemiskinan juga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya untuk melaksanakan berbagai program-program pengentasan kemiskinan namun upaya tersebut masih belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Menurut Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Budiman menyatakan bahwa "program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak efektif semisal Jamkesmas dan Raskin, program pemerintah juga dapat diartikan

tidak sensitif menciptakan kesempatan kerja”.<sup>1</sup> Untuk itu, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu dan saling bersinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas.

Berdasarkan data dari BPS, Persentase kemiskinan memang turun dari waktu ke waktu namun jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 masih cukup besar yaitu 31,02 juta jiwa atau 13,32% dari total penduduk Indonesia. Sebagian besar (63,39%) penduduk miskin tersebut tinggal di daerah perdesaan sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dari desa. Pembangunan sektor pertanian khususnya dan daerah pedesaan pada umumnya, termasuk di dalamnya infrastruktur pedesaan seperti jalan, irigasi, listrik, sarana air bersih dan sebagainya perlu mendapatkan prioritas utama di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Masalah kemiskinan juga merupakan tantangan yang cukup berat bagi pembangunan di Indonesia. Kemiskinan muncul dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.<sup>2</sup> Masalah kemiskinan juga berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dapat menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tidak mungkin dapat dicapai apabila penduduk masih terbelenggu dalam kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Kompas . (2011). *Program Pengentasan Kemiskinan Dipertanyakan*. Kompas, Senin, 31 Oktober : 19

<sup>2</sup> Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat* (Jakarta: CIDES, 1996), h.234

Sebelum krisis tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk KB serta bidang-bidang lainnya.

Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta jiwa karena krisis ekonomi yaitu dari 34,01 juta (17,47%) pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999. Setelah memasuki tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang hingga tahun 2010 menjadi 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,32% dari total penduduk Indonesia.

BPS merilis data penduduk miskin di Indonesia menurun tipis sepanjang 2008-2010. Jumlah penduduk miskin turun tahun 2008 sebesar 15,42 % menjadi 13,33% atau sebesar 34,96 juta menjadi 31,02 juta pada tahun 2010. Meskipun kini presentase penduduk miskin mengalami penurunan, tetapi angka kemiskinan itu terbilang tinggi yaitu sekitar 30 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin.

Penduduk miskin yang dimaksud adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Angka garis

kemiskinan pada 2009 Rp 200.262,-perkapita per bulan dan 2010 sebesar Rp 211.726 perkapita perbulan.

**Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi,  
2008-2010**

<b>Provinsi</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Aceh	23,53	21,80	20,98
Sumatera Utara	12,55	11,51	11,31
Sumatera Barat	10,67	9,54	9,50
Riau	10,63	9,48	8,65
Jambi	9,32	8,77	8,34
Sumatera Selatan	17,73	16,28	15,47
Bengkulu	20,64	18,59	18,30
Lampung	20,98	20,22	18,94
Kep. Bangka Belitung	8,58	7,46	6,51
Kepulauan Riau	9,18	8,27	8,05
DKI Jakarta	4,29	3,62	3,48
Jawa Barat	13,01	11,96	11,27
Jawa Tengah	19,23	17,72	16,56
DI Yogyakarta	18,32	17,73	16,83
Jawa Timur	18,51	16,68	15,26
Banten	8,15	7,64	7,16
Bali	6,17	5,13	4,88
Nusa Tenggara Barat	23,81	22,78	21,55
Nusa Tenggara Timur	25,65	23,31	23,03
Kalimantan Barat	11,07	9,30	9,02
Kalimantan Tengah	8,71	7,02	6,77
Kalimantan Selatan	6,48	5,12	5,21
Kalimantan Timur	9,51	7,73	7,66
Sulawesi Utara	10,10	9,79	9,10
Sulawesi Tengah	20,75	18,98	18,07
Sulawesi Selatan	13,34	12,31	11,60
Sulawesi Tenggara	19,53	18,93	17,05
Gorontalo	24,88	25,01	23,19
Sulawesi Barat	16,73	15,29	13,58
Maluku	29,66	28,23	27,74
Maluku Utara	11,28	10,36	9,42
Papua Barat	35,12	35,71	34,88
Papua	37,08	37,53	36,80
<b>Indonesia</b>	<b>15,42</b>	<b>14,15</b>	<b>14,15</b>

Sumber: BPS

Pengukuran kemiskinan perlu dilakukan untuk membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi bahkan angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam yang melimpah seperti Papua dan Papua Barat. Persentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 14,15 persen. Selain Papua, provinsi lain yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi adalah Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara, dan lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi sosial. Pada tahun 1960-an, pembangunan ekonomi dan strategi pertumbuhan banyak diterapkan oleh Negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Perencanaan ekonomi Indonesia di awal masa Orde Baru sangat percaya pada adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik.<sup>3</sup> Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa efek menetes ke bawah yang diharapkan ternyata tidak berjalan sempurna.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. 2009. *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti oleh perluasan kesempatan kerja yang sebanding sehingga pengangguran masih besar, tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan dan ada indikasi melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan

Menurut BPS, sebagai salah satu Negara Asia Pasifik, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan laporan organisasi dana moneter internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi lima anggota negara ASEAN, yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand secara keseluruhan mencapai 0,7 persen pada saat tahun 2009, menurun bila dibandingkan sebelumnya sekitar 4,8 persen sebagai dampak dari krisis global. Negara Malaysia, Singapura dan Thailand mengalami pertumbuhan negatif masing-masing tumbuh minus 3,6 persen, minus 3,3 persen, dan minus 3,5 persen. Sedangkan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi pada tahun 2009 yaitu berdasarkan PDB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,5 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 4,9 persen.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling asasi bagi semua orang. Bagi sebagian besar orang miskin, pendidikan merupakan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan yang tinggi yang ditunjang dengan kondisi kesehatan yang baik, pada akhirnya

dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.<sup>4</sup>

BPS mencatat bahwa pada tahun 2009, sebesar 81,40 persen kepala rumah tangga miskin berpendidikan SD ke bawah dan hal tersebut membuat penduduk miskin mempunyai keterbatasan untuk mengembangkan diri. Akibatnya mereka tidak mampu berkompetensi untuk memasuki lapangan kerja yang semakin terbatas dan membutuhkan kualifikasi yang tinggi. Mereka terpaksa menganggur atau bekerja dengan upah yang rendah sehingga pendapatannya tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemudian pendidikan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk melihat sejauh mana kualitas sumber daya yang dimiliki dapat juga dilihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat mencerminkan tingginya pendidikan yang telah dicapai penduduk suatu masyarakat. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Gatot Subroto. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta.2009

<sup>5</sup> Merna Kumalasari. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Semarang. 2011

**Tabel 1.2 Rata-Rata lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun keatas  
Menurut Provinsi 2008-2010 (Tahun)**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1	Aceh	8,3	8,6	8,8
2	Sumatera Utara	8,5	8,6	8,8
3	Sumatera Barat	8,3	8,5	8,5
4	Riau	8,5	8,6	8,6
5	Jambi	7,6	7,7	7,8
6	Sumatera Selatan	7,6	7,7	7,8
7	Bengkulu	7,8	8,2	8,2
8	Lampung	7,2	7,7	7,7
9	Kep.Bangka Belitung	7,4	7,4	7,4
10	Kepulauan Riau	8,1	8,1	9,6
11	DKI Jakarta	10,2	10,3	10,4
12	Jawa Barat	7,5	7,7	8
13	Jawa Tengah	6,9	7,1	7,2
14	DI Yogyakarta	8,7	8,8	9,1
15	Jawa Timur	7	7,2	7,2
16	Banten	7,7	8	8,3
17	Bali	7,8	7,8	8,2
18	Nusa Tenggara Barat	6,5	6,6	6,6
19	Nusa Tenggara Timur	6,4	6,6	7
20	Kalimantan Barat	6,6	6,6	6,8
21	Kalimantan Tengah	7,7	7,8	8
22	Kalimantan Selatan	7,4	7,5	7,7
23	Kalimantan Timur	8,7	8,7	8,8
24	Sulawesi Utara	8,7	8,8	8,9
25	Sulawesi Tengah	7,8	7,9	8
26	Sulawesi Selatan	7,3	7,4	7,8
27	Sulawesi Tenggara	7,7	7,9	8,1
28	Gorontalo	6,9	7,2	7,4
29	Sulawesi Barat	7	7,1	7,1
30	Maluku	8,5	8,6	9
31	Maluku Utara	7,9	8,2	8,4
32	Papua Barat	7,7	8,2	9,2
33	Papua	6,3	6,4	6,3
	<b>Indonesia</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>

Sumber: BPS



Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia masih rendah yaitu selama 7,5 tahun pada tahun 2008, tahun 2009 selama 7,7 tahun dan tahun 2010 selama 7,9 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 secara nasional dapat dikatakan rata-rata penduduk Indonesia baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas I SMP atau belum/tidak tamat SMP.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu pengangguran. Pengangguran akan menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan atau mengurangi pendapatan orang tersebut dan tingkat pendapatan masyarakat akan menjadi salah satu faktor yang menentukan kemakmuran hidup masyarakat tersebut. Menurut Dian Oktaviani (2001) yang dikutip oleh Ravi Dwi Wijayanto menyatakan bahwa “tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di Indonesia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah pengangguran.”<sup>6</sup>

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kemiskinan yaitu tingkat kesempatan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan Nurfitri Yanti mengatakan bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap variabel

---

<sup>6</sup> Dwi Ravi Wijayanto. *Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten kota jawa tengah tahun 2005-2008*. Semarang. 2010

tingkat kemiskinan.<sup>7</sup> Hal ini berarti jika tingkat kesempatan kerja mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Melihat beberapa paparan di atas, mengenai kemiskinan di Indonesia terlihat bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kemiskinan di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan?
3. Apakah terdapat pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap kemiskinan?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah di identifikasikan diatas, penelitian ini dibatasi pada permasalahan: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas.

---

<sup>7</sup> Nurfitri Yanti, *pengaruh pertumbuhan ekonomi ,inflasi dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1999-2009*. Yogyakarta.2011

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan di Indonesia?
- 2) Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia?
- 3) Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan wawasan dan menambah pengetahuan baru tentang ekonomi makro khususnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia.
2. Secara praktis, sebagai bahan referensi yang dapat dipergunakan untuk mengetahui gambaran mengenai ada tidaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Sebagai bahan pertimbangan yang relevan bagi peneliti di masa yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penelitian

masalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.